

Global Governance: Perspektif Liberalisme

Oleh: Robi Cahyadi Kurniawan *

Abstract

The emergence of global governance as the needs of "legitimacy" of the norms in force in the world at that time. Term of the legitimacy is the product of the politics that provide justification. Global governance is seen more as a political product rather than as a concept is useful as a source of legitimacy. Governance issues reduced a political as a concept, mechanism and process of reorganizing the world to be more open to the market.

Keywords: *Global governance, legitimacy, a product of politics, liberalism*

Pendahuluan

Sejak akhir perang dingin, globalisasi menjadi perbincangan tidak hanya dalam ilmu sosial tetapi juga dalam komunitas politik internasional. Globalisasi menciptakan skala (ruang) yang berkembang, pertumbuhan, percepatan dan kedalaman pengaruh dalam arus atau aliran interregional dan pola-pola dalam interaksi sosial (Held; McGrew, 2000:4). Tetapi apakah globalisasi itu? Globalisasi biasanya menunjukkan sesuatu yang multidimensi (Giddens; 1990, Held; 1999).

Globalisasi menurut Giddens meliputi penyebaran dari 4 dimensi institusi, meliputi: a) hasil modernisasi dalam sistem negara bangsa global; b) tatanan militer dunia; c) ekonomi kapitalis dunia, dan; d) divisi pekerja internasional.

Held (1999), melihat 7 (tujuh) aspek sejarah globalisasi untuk menjelaskan tatanan globalisasi dunia: politik; termasuk penyebaran negara bangsa, timbulnya multi lapisan (tingkat) pemerintahan, reaksi yang berkembang dalam organisasi kekerasan; termasuk perang dan produksi senjata, perdagangan dan pasar global, keuangan global, kekuatan perusahaan multinasional, jaringan produksi global, migrasi global, globalisasi budaya.

Komisi *Global Governance (GloGov)* lahir untuk menyikapi hal tersebut, kelompok independen dari 28 pemimpin negara di dunia yang melaporkan persoalan-persoalan yang disebut *Our Global Neighborhood* (lingkungan global kita) tahun 1995. Implikasi dari globalisasi bagi *GloGov*. Konsepsi mereka tentang globalisasi meliputi beberapa dimensi; seperti ekonomi, keamanan, lingkungan dan munculnya masyarakat global (*global civil society*), pembangunan global, termasuk bantuan dalam pembangunan.

* Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

Defenisi *Global Governance*

Global governance, dalam pandangan Rosenau (1995:13), mengarahkan ke lebih dari institusi formal dan organisasi-organisasi di mana manajemen dalam peristiwa internasional terus-menerus berlangsung, membayangkan memasukkan sistem-sistem atas aturan dalam semua tingkatan pada aktivitas manusia dan terus mencari tujuan-tujuan pengawasan sebagai reaksi atau akibat transnasional.

Pemerintahan global adalah membuat/mensetting institusi-institusi global yang bertujuan merubah hasil dari globalisasi. *Global governance* sebagai interaksi horizontal dan vertikal, yang mengklaim semua orang terlibat, lebih cenderung kearah politis daripada konsep akademis, yang dipandang sebagai *good governance in global level* mencakup norma yang jelas didalamnya (Muhadi Sugiono, 2007).

Akhir dari perang dingin menandakan debat baru dalam globalisasi dan pemerintahan. Ketergantungan yang berakselerasi kedalam globalisasi dan proses ini disebut sebagai *global governance*. *Governance* menjadi relevan setidaknya dalam dua hal sebagai berikut; *pertama*; diskusi tentang kebutuhan-kebutuhan dalam *global governance*, apa yang dimaksud dengan perubahan global, dan apa yang dimaksud dengan solusi kebijakan global? *Kedua*, berkenaan dengan implikasi politik dari perubahan-perubahan, walaupun mereka menafikkan aturan negara dan meningkatkan eksistensi *global governance*.

Negara dapat bekerjasama dengan organisasi multilateral, seperti EU, dapat meregulasi perdagangan internasional bersama WTO, dapat mengintervensi situasi kritis bersama DK PBB. Terdapat tiga persepsi tentang *governance* (pemerintahan) yang dapat diidentifikasi (dijelaskan) oleh hubungan internasional, yaitu; a) pandangan terbatas (sempit) tentang pemerintahan; berkenaan dengan seluruh aktivitas (kegiatan dan praktek) dalam jaringan transnasional, dan; b) Pandangan yang lebih luas dari *global governance*; sebagai hubungan "meta" proses koordinasi transnasional dan aktivitas intergovernmental (antar-pemerintah).

Defenisi minimal dari *neo-realisme* yang menyamakannya dengan pemerintah dunia (*World Government*) dan menolak konsep lain dengan naif. Komisi Independen *Global Governace* memandang sebentar lagi konsentrasi aktivitas transnasional ke arah *global governance*. *Glogov* dapat dipandang terutama sebagai hubungan-hubungan antar pemerintah, tetapi sekarang juga terkait antar NGO, gerakan sosial masyarakat dan warga negara, perusahaan-perusahaan multinasional dan pasar keuangan global (Commision of GloGov; 1995:2). Komisi melihat opini aktivitas aktor-aktor ekonomi (seperti perusahaan multinasional) sebagai bagian daripada aktivitas ekonomi, bagian dari globalisasi dan dibutuhkan oleh pemerintah.

Asumsi Dasar Liberalisme

Jackson & Sorensen (1999), mengemukakan lima asumsi dasar dari liberalisme, yaitu: a) negara menjamin kebebasan individu; b) berpandangan positif tentang sifat manusia; c) mengedepankan akal pikiran dengan prinsip-prinsip rasionalitas; d) memaksimalkan peran individu dan aktor-aktor non negara, dan; e) kebebasan, kerjasama, kemajuan dan kesejahteraan.

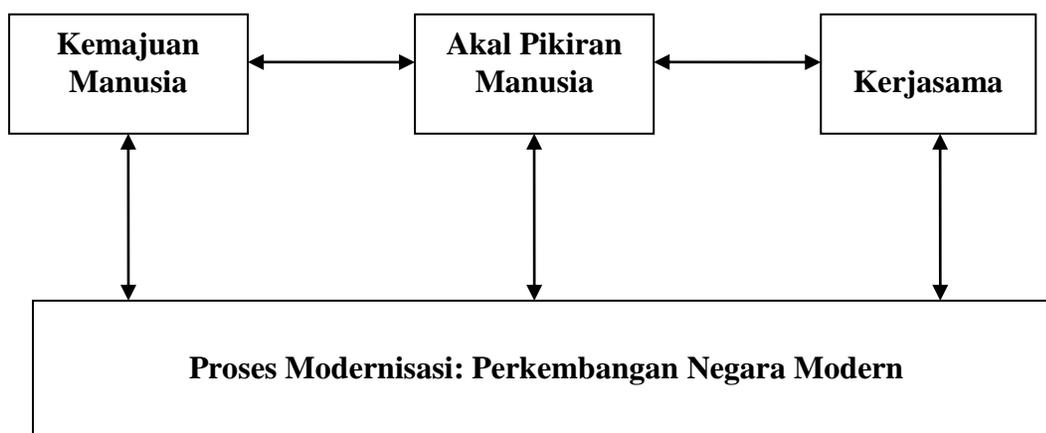
Kaum liberal mengambil pandangan positif tentang sifat manusia, akal pikiran manusia dan prinsip-prinsip rasional dapat dipakai dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional. Para liberalis percaya para individu ini memiliki banyak kepentingan dan yang

dapat berguna dalam aksi-aksi sosial yang kooperatif dan menghasilkan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain.

Kemajuan adalah asumsi dasar dari liberalisme yang lain, yang lebih terfokuskan pada individu dan memperhatikan kebahagiaan dan kesenangan individu. John Locke berpendapat bahwa negara muncul untuk menjamin kebebasan warga negaranya dan kemudian mengizinkan mereka menjalani kehidupannya dan menggapai kebahagiaannya tanpa campur tangan tak semestinya dari orang lain.

Pemikiran kaum liberal sangat erat hubungannya dengan kemunculan negara konstitusional modern. Kaum liberal berpendapat bahwa modernisasi adalah proses yang menimbulkan banyak kemajuan diberbagai bidang kehidupan. Proses modernisasi memperluas ruang lingkup bagi kerjasama lintas batas internasional. Kemajuan berarti kehidupan yang lebih baik bagi mayoritas individu. Manusia memiliki akal pikiran dan rasionalitas, ketika digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah internasional melalui kerjasama misalnya maka akan tercipta sebuah keharmonisan dalam hubungan internasional.

Bagan 1.
Asumsi Dasar Liberal



Justifikasi Liberalisme dalam Pandangan Liberalis

Kebanyakan kaum liberalis tidak menanyakan pentingnya negara sebagai aktor dalam arena internasional. Mereka mengkritisi fokus utama *neorealists* yang menempatkan negara dan argumen aktor-aktor lain juga penting ketika mencoba memahami politik dunia. Aktor lain berasal dari individual, perdagangan atau perusahaan, pentingnya koorperasi transnasional dan pertumbuhan organisasi internasional, seperti PBB, Bank Dunia, EU dan lainnya. Transaksi internasional seperti arus/aliran uang, barang-barang, orang menjadi signifikan sejak Perang Dunia ke II.

Penting untuk memahami bahwa hubungan internasional sekarang dapat dikarakteristikan dalam ketergantungan kompleks, konsep yang menggambarkan situasi di mana negara-negara dan ekonominya saling tergantung, ketika fokus beralih dari negara kebanyakan hal. Beberapa liberalis mengganti gagasan model *cobweb* untuk menggambarkan

kontrak transnasional di mana negara memiliki kontrol yang sedikit Apakah negara tidak lagi memiliki kewenangan untuk digunakan?

David Held (1999:189), mengatakan bahwa peredaran mata uang dalam perdagangan diseluruh dunia dan simpanan (obligasi) pemerintah, mengartikan bahwa tingkat pertukaran (kurs) dan kurs permintaan (*interest rate*) ditentukan oleh pasar keuangan global. Negara tidak punya kuasa (*power*) untuk menentukan kurs (pertukaran) sendiri. Seluruh negara harus menyesuaikan diri kepasar keuangan global, walaupun mereka inginkan atau tidak.

Perbedaan pandangan tentang pengaruh globalisasi dalam *power* negara dapat ditemukan dalam dua debat: *pertama*; pembahasan mengenai perbandingan pembangunan nasional; antara; a) ilmuwan politik; kepentingan negara dalam pembangunan ekonomi (Hobson,1995; Wade, 1990; Weiss, 1998), dan; b) para ahli ekonomi; kepentingan kebijakan ekonomi neo liberal. *Kedua*, pembahasan dalam hubungan internasional; a) ketika kepentingan nasional berperan lebih penting, dan; b) meningkatnya dominasi globalisasi dan integrasi dapat mencegah kepentingan nasional dari hubungan internasional (Rosenau;1995, Waltz;1999, Keohane, Nye; 2000).

Global Governace dalam paradigma liberalisme berkenaan dengan aktivitas politik bukan aktivitas ekonomi (defenisi ini digunakan oleh Pusat Study *GloGov*). Cara kaum liberalis memahami *governance* tidak sebagai *government* tetapi sebagai kerangka (pandangan) minimal tentang kebutuhan aturan dalam menghadapi masalah-masalah global, menjamin institusi-institusi seperti organisasi internasional dan pemerintah nasional.

Global Governance adalah tentang tata cara menjalankan dan menyelenggarakan aturan-aturan politik global. *GloGov* dalam pandangan liberalis tidak hanya sekedar norma-norma kedaulatan dan tanpa intervensi, yang mencakup aktivitas politik dan sub nasional, nasional dan tingkat supra nasional.

Pertumbuhan beberapa rezim internasional menjadi bagian dari *Global Governance*. Rezim internasional menetapkan prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan keputusan di wilayah aktor membuat isu-isu (Krasner; 1982). Rezim internasional muncul karena negara-negara mengakui globalisasi kebutuhan perusahaan-perusahaan internasional. WTO adalah contoh lain dari rezim internasional, bermaksud untuk menyusun tatanan aturan perdagangan internasional dan menurunkan hambatan perdagangan dengan cara melindungi perdagangan bebas.

Para liberalis dalam hubungan internasional menekankan pada norma-norma internasional dan praktek kebijakan publik global dapat dipengaruhi oleh aktor non pemerintah. Contohnya: a) *Green Peace*: Isu lingkungan hidup; b) *Human Right Watch*: isu Hak Asasi Manusia (HAM); c) *Transparency International*: Korupsi (sukes menjadi agenda global dunia), dan; d) *Amnesty International*: berhasil menekan pemerintah untuk melepaskan tahanan-tahanan politik, penegaan isu HAM, seperti hukuman mati (Rosenau, Wang; 2001). Beberapa pemerintahan menyerupai bentuk 'korporatisme' dalam level global karena mereka memasukkan wakiknya dalam pemerintah (contoh *World Bank*), bisnis dan masyarakat global (Ottaway, 2001).

Konsentrasi utama liberal adalah menganalisa bagaimana institusi internasional berfungsi dan bagaimana mereka bekerja. Mereka menganalisis pengaruh institusi internasional dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti rezim perdagangan dan organisasi HAM. Solidarisme lebih melihat ke militer, daripada dalam bidang soisal ekonomi. Argumen mereka bahwa *glogov* sudah ada sejak intervensi kemanusiaan dimulai, mengembangkan jaminan keamanan manusia daripada menjaga keadilan negara yang berkuasa. Misalnya intervensi di Kosovo dianggap sebagai kegagalan PBB menyediakan dasar untuk *glogov*.

Intervensi meminimalisir standar kemanusiaan, melanggar piagam PBB. Konvensi Genosida tahun 1948 dan Konvensi Jenewa. Liberalisme *concern* dengan bangkitnya institusi-institusi *global governance* berkenaan dengan isu-isu plural.

Kaum liberalis lebih konsentrasi bagaimana globalisasi berpengaruh atas segalanya, dan mereka mengangkat analisis yang lebih luas daripada pemerintahan. Pendekatan liberalis lebih memandang pada hubungan harmonis dan keuntungan dari pasar bebas daripada konflik. Liberalis seperti James Rosenau, fokus pada efisiensi dan bagaimana mengemudikan situasi yang bertambah kompleks dan kewenangan yang tidak cocok.

Tabel 1.
Perbandingan *Global Governance* dalam Dua Perspektif

	<i>Neo realis</i>	<i>Liberalis</i>
Aktor	Negara, Aktor dominan	Negara, bukan aktor dominant
Instrumen	Efektifitas kekuatan militer	Ekonomi dan sumber lain
Sumber	<i>Balance of power</i>	<i>Internasional relations</i>
Kebijakan Luar Negeri	Ditentukan oleh sistem internasional	Ditentukan oleh faktor intra dan transnasional

Sumber: Keohane & Nye (2001:32), Jackson & Sorensen (1999), Viotti & Kauppi (1987)

Tabel 2.
Gambaran *Global Governance*

	<i>Neo Realisme</i>	<i>Pluralisme</i>	<i>Liberalisme</i>
Keberadaan <i>Global Governance</i>	Tidak ada <i>Global Governance</i> , sistem internasional bersifat anarki	Hukum internasional, menegakkan prinsip kedaulatan dan non-intervensi	Rezim internasional sbg bagian dari <i>Global Governance</i> , pemerintahan di tingkat sub, nasional & supra
Visi dari <i>Global Governance</i>	Mencapai keseimbangan <i>power</i> dgn aliansi (persekutuan)	Kerangka hukum berdasarkan norma-norma pluralis	Kerangka hukum berdasarkan norma-norma solidaritas termasuk hak individu dan hak kedaulatan

Sumber: Kjaer; 2004: 83

Tabel 3.
Tipologi Organisasi Internasional dan Transnasional

			Tujuan		Organisasi	
			<i>Khusus</i>		<i>Umum</i>	
J E N I S K E A N G G O T A A N	R E G I O N A L	ANTAR PEMERINTAH	NATO NAFTA		OAU (Organisasi Persatuan Afrika)	
		SUPRANASIONAL	ECSC (Masyarakat Baja dan Batubara Eropa) EURATOM		Uni Eropa	
		TRANSNASIONAL	Jaringan anti kemiskinan Eropa		Gerakan Eropa	
	U N I V E R S I T A S	ANTAR PEMERINTAH	WHO IAEA (Badan Energi Atom Internasional)		PBB	
		SUPRANASIONAL				
		TRANSNASIONAL	Amnesti Internasional		Asosiasi Federalis Dunia	

Penutup

Dengan masuknya globalisasi dalam agenda, para liberalis mengklaim bahwa penambahan aktor-aktor multinasional dan jaringan transnasional melemahkan kewenangan dari negara. Isu utama dari teori *glogov* adalah efisiensi output bagaimana membuat negara-bangsa tunduk dan mengikuti aturan internasional dan bagaimana menemukan solusi terbaik untuk masalah-masalah global.

Ekonomi neo liberal mengarahkan negara seharusnya menyediakan dan memungkinkan kerangka untuk pasar bebas, tanpa adanya intervensi dari negara. Perdagangan global akan memimpin pertumbuhan ekonomi dan menjamin kesejahteraan umum.

Kaum liberal dalam hubungan internasional mendebat bahwa globalisasi ekonomi mungkin melemahkan kekuasaan negara. James Rosenau (1995:18), mengobservasi perubahan lokasi kewenangan dan sistem kontrol telah mengambil tempat perubahan kewenangan telah dipindahkan dari bidang politik ke bidang ekonomi dan sosial.

Sebaliknya Kennet Waltz (1999:697-699), mendasarkan politik berlaku setelah ekonomi, yang berargumen bahwa globalisasi ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya. Kebijakan dari negaralah yang membuat proses globalisasi ekonomi. Negara penting dalam *setting* globalisasi, karena keberadaan mereka. Mereka mencoba bertahan, bertanding, beradaptasi, melindungi diri sendiri dan meniru negara yang telah berhasil. Negara memainkan fungsi sosial, ekonomi dan politik yang penting dan tidak ada organisasi yang terlihat sebagai kompetitor atas mereka.

Jadi, jika politik dipandang lebih penting dari ekonomi, posisi negara tetap didominasi oleh aktor, dan jika ekonomi mendahului politik, posisi negara mengalami kemunduran. Posisi antar keduanya ini disebut *transformationalist* (Held; 1999).

DAFTAR PUSTAKA

- Commission on Global Governance. 1995. *Our Global Neighborhood*. Oxford: Oxford University Press
- Giddens, Anthony. 1990. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press
- Held, David. 1999. *Global Transformation. Politics, Economics, and Culture*. Stanford: Stanford University Press
- Held, David and Anthony McGrew. 2000. *The Greats Globalization Debate, The Global Transformation Reader, An Introduction to the Globalization Debate*. Cambridge: Polity Press
- Jackson, Robert & George Sorensen. 1999. *Introduction to Internasional Relations*. Oxford: Oxford University Press
- Keohane, Robert & Joseph Nye. 2000. *Governance in a Globalizing World*. Washington DC: Brooking Institution Press
- Keohane, Robert & Nye Joseph. 2001. *Power and Interdepedence*, 3rd edn. New York: Longman
- Kjaer, Anne Mette. 2004. *Governance*. Cambridge: Polity Press
- Krasner, Stephen D. 1982. "Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variabel". *International Organization*. Vol 36, No. 2, 185-205
- Ottaway, Marina (2001), "Corporatism Goes Global: International Organization, Non Governmental Organization Network, and Transnational Business". *Global Governance*, Vol. 7, No. 3. 265-293
- Rosenau, James N. 1995. "Governance In Twenty First Century". *Global Governance*. Vol. 1, No. 1, 13-43
- Rosenau, James N & Wang Hongyin. 2001. "Transparency International and Corruption as an Issue of Global Governance". *Global Governance*. Vol. 7, No.1, 25-50
- Viotti, Paul R. and Kauppi, Mark V. 1987. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. New York: Macmillan
- Waltz, Kenneth N. 1999. "Globalization and Governance". *PS, Political Science & Politics*. Vol. 32, No. 4 : 693-700
- Sugiono, Muhadi. "Perkuliahan Politik Internasional". Bahasan *Global Governance*. 13 Desember 2007